

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Asni, 2020, *Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Hukum Indonesia (Pendekatan integratif)*, Alauddin University Press, Gowa.
- Bachtiar, 2018 *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Tangerang Selatan.
- Harahap, A. M., 2020 *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Literasi Nusantara, Malang.
- Martien, D., 2023, *Perlindungan Hukum Data pribadi*, Mitra Ilmu, Makassar.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat.
- Nuroniya, W., 2022, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Yayasan Hamjah Diha, Lombok.
- Saragih, Y. M., Hadiyanto, A., Prasetyo, M. S. E., 2022, *Pengantar Hukum Pidana Transisi Hukum Pidana di Indonesia*, CV. Tungga Esti, Medan.
- Sulaiman, A., 2019, *Pengantar Ilmu Hukum*, UIN Jakarta bersama Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (YPPSDM Jakarta), Jakarta.
- Syauket, A., Adawiah, R. A., Ferdiananto, A., 2022, *Hukum Perlindungan Investor Analisis Investasi Ilegal Binomo*, CV. Literasi Nusantara Abadi, Malang.
- Wahyuni, F., 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for Elimination of The Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

C. JURNAL

Anggara, Riza Gineung A., Firdaus, Claudio B., “*Bentuk Dari Pekerjaan Terburuk Bagi Seorang Anak Menurut Konvensi ILO*”, JHP17 (Jurnal Hasil Penelitian), Vol. 6, No. 2, 2022, DOI: <https://doi.org/10.30996/jhp17.v6i2.6205>

Anggraeni, S. D., Ahmad H., “*Kajian Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang*”, Judiciary (Jurnal Hukum dan Keadilan), Vol. 11, No. 1, 2022, hlm. 45-61.

Cahyani, K. N., “*Faktor Ekonomi Penyebab Eksploitasi Anak Dalam Tinjauan Hak Asasi Manusia*” LEX et ORDO Jurnal Hukum dan Kebijakan Vol. 1, No. 1, 2023, hlm. 61-67.

Haryono, T. J. S., Kinasih, S. E., Mas’udah, S., “*Exploitation of Child Domestic Workers in Ngenger Culture of Javanese Society in Indonesia*”, *Journal of International Women’s Studies*, Vol. 26 No. 4, 2024, <https://vc.bridgew.edu/jiws/vol26/iss4/2>

Nuraeni, N., Dede K., “*Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Islam*”, Al-‘Adalah, Vol. 14, No. 1, 2017, DOI: <http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v14i1.1866>

Prayoga, A. A., Husudo, J. A., Maharani, A. E. P., “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional*”,

Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, Vol. 2, No. 2, 2023, hlm. 188-200.

Puspawati, N. K., “Implementasi Kebijakan Pemberantasan Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional”, Indonesian Journal of Law and Justice, Vol. 2, No. 3, 2025, DOI: <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i3.3661>

Restanto, A. D., Pangestika, E. Q., “Perdagangan Manusia di Indonesia: Pelanggaran HAM dan Urgensi Penegakan Hukum”, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 7, No. 2, 2023, DOI: <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i2.8748>

Salsabila, Elfira S., Masnun, Muh A., “Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Bekerja Sebagai Pekerja Rumah Tangga”, Novum: Jurnal Hukum, Vol. 11, No. 3, 2024, DOI: <https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.62354>

Superani, Andi V., Parvez, Imas Novita J. A., “Rekonstruksi RUU PPRT Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Dalam Penanggulangan Kekerasan Terhadap PPRT Perempuan Dan Anak (Reconstruction Domestic Worker Bill of Act for Legal Protection from Violence)”, IPMHI Law Journal Vol. 2, No. 1, 2022, DOI: <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i2.54782>

Wati, N., “Penerapan Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Penyidik Pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Barat”, Swara Justisia, Vol. 5, No. 2, 2021, DOI: <https://doi.org/10.31933/ujsj.v5i2.208>

D. SKRIPSI/TESIS

Rahardjo, L. M., “Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan Dengan Profesi Pekerja Rumah Tangga Akibat Eksploitasi Perdagangan Orang”, Skripsi, Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah, universitas Islam negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2023.

Wilujeng, D. I., “Studi Komparasi Hukum Pidana Indonesia dan Filipina tentang Perdagangan Orang (Trafficking in Persons)”, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016.

E. INTERNET

“Modus TPPO Terus berkembang, Pemerintah Indonesia Berkomitmen Perkuat Pencegahan di Akar Rumput”, 14 November 2024, <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTUyOQ>, diakses pada 14 Maret 2025.

“Siaran Pers Bersama Komnas Perempuan, Komnas HAM, KPAI, KND Mendorong Pengesahan RUU PPRT”, 13 Februari 2025,

<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-bersama-komnas-perempuan-komnas-ham-kpai-knd-mendorong-pengesahan-ruu-pprt>, diakses pada 02 November 2024.

“Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Peringatan Hari Pekerja Rumah Tangga Nasional: Bersama Mendorong Percepatan Pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga”, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang%20peringatan-hari-pekerja-rumah-tangga-nasional-bersama-mendorong-percepatan-pengesahan-ruu-pelindungan-pekerja-rumah-tangga>, diakses pada 29 Mei 2025.

“Sosiolog: Batasan Usia 18 Tahun Tidak realistis”, detik.com (online), 12 Mei 2010, <https://news.detik.com/berita/d-1355621/sosiolog-batasan-usia-18-tahun-tidak-realistic#>, diakses pada 26 Juni 2025.

Ady Thea D. A., “4 Tantangan Penegakan Hukum Kasus TPPO”, Hukumonline.Com (online), 1 Agustus 2023, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/4-tantangan-penegakan-hukum-kasus-tpo-lt64c900b8447f1/>, diakses pada 29 Mei 2025.

Agnes Z. Yonatan, “Ada Lebih Dari 1 Juta Pekerja Anak Di Indonesia,” GoodStats (online), 08 Mei 2024, <https://data.goodstats.id/statistic/ada-lebih-dari-1-juta-pekerja-anak-di-indonesia-SIURY>, diakses pada 02 November 2024.

Dzaky dan Ambaranie Nadia Kemala Movanita Nurcahyo, “ART Lompat Dari Lantai 3 Rumah Di Tangerang, Majikan Jadi Tersangka,” Kompas.Com (online), 6 Juni 2024, <https://megapolitan.kompas.com/read/2024/06/06/13190021/art-lompat-dari-lantai-3-rumah-di-tangerang-majikan-jadi-tersangka>, diakses pada 03 November 2024.

Ervana Trikarinaputri, “Pekerja Anak di Sektor PRT, KPAI: Praktik Eksploitasi Terselubung”, Tempo.co (online), 21 Mei 2025, <https://www.tempo.co/politik/pekerja-anak-di-sektor-prt-kpai-praktik-eksploitasi-terselubung-1503887>, diakses 24 Juni 2025.

Hana Dewi Kinarina Kaban, “KPAI: UU PPRT Harapan Tekan Kasus Eksploitasi Anak Sebagai Pembantu,” ANTARA (online), 19 Juli 2024, <https://www.antaranews.com/berita/4206606/kpai-uu-pprt-harapan-tekan-kasus-eksploitasi-anak-sebagai-pembantu>, diakses pada 02 November 2024.

Nano Tresna Arfana, “DPR Jelaskan Definisi Pengusaha dan Pemberi Kerja dalam UU Ketenagakerjaan”, 21 September 2022,

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18525>, diakses pada 28 April 2025.

F. LAIN-LAIN

Badan Keahlian DPR RI, *Pengungkapan Kasus Dugaan Perdagangan Orang ke Bahrain*, Jakarta, 2025.

International Labour Organization (ILO), "Menanggulangi Pekerja Anak Di Sektor Rumah Tangga: Panduan Aksi Bagi Pekerja Rumah Tangga Dan Organisasi Pekerja Rumah Tangga", (terjemahan Kantor Perburuhan Internasional Jakarta), Jakarta, Cet. 1, 2017.

Konvensi Hak Anak, PBB, 1989.

Republic Act No. 10361 An Act Concerning Instituting Policies For The Protection And Welfare Of Domestic Workers , Filipina, 2013.

Republic Act No. 10364 An Act Expanding Republic Act No. 9208, Entitled An Act To Institute Policies To Eliminate Trafficking In Persons Especially Women And Children, Establishing The Necessary Institutional Mechanisms For The Protection And Support Of Trafficked Persons, Providing Penalties For Its Violations And For Other Purposes, Filipina, 2012.

Republic Act No. 3815 An Act Revising The Penal Code And Other Penal Laws, Filipina, 1930.

Republic Act No. 7610 An Act Providing For Stronger Deterrence And Special Protection Against Child Abuse, Exploitation And Discrimination, Providing Penalties For Its Violation, And For Other Purposes, Filipina, 1992.

Republic Act No. 9208 An Act To Institute Policies To Eliminate Trafficking In Persons Especially Women And Children, Establishing The Necessary Institutional Mechanisms For The Protection And Support Of Trafficked Persons, Providing Penalties For Its Violations, And For Other, Filipina, 2003.

Republic Act No. 9231 An Act Providing For The Elimination Of The Worst Forms Of Child Labor And Affording Stronger Protection For The Working Child, Amending For This Purpose Republic Act No. 7610, As Amended, Otherwise Known As The "Special Protection Of Children Against Child Abuse, Exploitation And Discrimination Act", Filipina, 2003.

*United Nations Convention, Protocol to Prevent, Suppress and Punish
Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the
United Nations Convention against Transnational Organized Crime, 2000.*